



RENJA
DINAS
PERHUBUNGAN
PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja-SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dalam penulisan renja ini kami menyadari masih ada kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya kami berharap Renja ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Provinsi Kalimantan Utara, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.

Tanjung Selor, 22 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Utara



H. Andi Nasuha, ST. MM
Nid. 196710302000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II Hasil Evaluasi Renja Tahun 2023 (Triwulan 4) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	8
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi.....	20
Target Kinerja	20
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi ...Target Kinerja	21
2.1.3 Faktor Penghambat/Pendorong Capaian Kinerja.....	25
2.1.4 Implikasi Terhadap Target Capaian Renstra Perangkat Daerah	32
2.1.5 Kebijakan/Tindakan/Solusi Untuk Mengatasi Faktor-FaktorPenghambat	33
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	67
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	67
3.2 Telaahan terhadap prioritas provinsi.....	74
3.3 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	80
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	82
BAB V PENUTUP	99
5.1 KESIMPULAN	99
5.2 SARAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 (TW4) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	9
Tabel 2.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja 20	20
Tabel 2.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja 21	21
Tabel 2.4 Faktor Penghambat/Pendorong Capaian Kinerja	25
Tabel 2.5 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
Tabel 2.7 Usulan Program/Kegiatan/Subkegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.....	66
Tabel 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	67
Tabel 3.2 Telaahan terhadap prioritas provinsi	74
Tabel 3.3 Target Dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	81
Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	83

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja Perangkat Daerah menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar stakeholder terkait tentang rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada upaya sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yang menghubungkan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah

kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- 13.
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 112 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Dan Danau;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2021 Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 56);
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Penyeberangan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 44);
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 38);
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor ...).
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai tindak lanjut dari Renstra Tahun 2021-2026 dan merupakan panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2023, dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara hingga tahun 2025.
- 2) Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara kedalam program/kegiatan/sub kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2025 dan prakiraan tahun 2026.
- 3) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.
- 4) Menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025; dan
- 5) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2022

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan

program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

Hasil Evaluasi Renja Tahun 2023 (Triwulan 4) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja triwulan 4 Tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024) akan disajikan pada bab ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 meliputi 1 periode (5 tahun) Renstra Berikut review hasil evaluasi pelaksanaan Renja triwulan 4 Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara beserta kedua UPTD Pelabuhan:

a. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Pagu Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp32.353.932.404,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp27.402.842.386,00 dengan realisasi fisik sebesar 90%.

b. UPTD Pelabuhan Tengkeyu 1 Tarakan

Pagu anggaran UPTD Pelabuhan Tengkeyu 1 Tarakan sebesar Rp3.982.336.682,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.808.989.241,00 dan realisasi fisik 100%.

c. UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

Pagu anggaran untuk UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan sebesar Rp3.208.949.497,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.139.844.923,00 dan realisasi fisik 97,85%.

Secara umum, kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara beserta kedua UPTD Pelabuhan terbilang baik Hingga akhir periode tahun anggaran 2023.

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 (TW4) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)						Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan																								
			K	Satuan	Rp.	K	Rp.	Target Renja PD Tahun (2023)			Realisasi Renja PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp.	K	Rp.	K	%																				
								K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	%																										
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6		9		10 =5+7+9		11 = 10/4																					
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																																							
2	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																																							
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																																							
2.15.01.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																							
2.15.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun	12	Dokumen	2.546.762.500,00	2	280.336.876,00	0	0	-	0	-			1	18.690.019,00	1	18.690.019,00	8,33	0,73																				
2.15.01.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang di Evaluasi	20	Dokumen	2.506.560.000,00	4	392.482.800,00	4	Dokumen	288.808.418,00	4	270.041.174,00	100,00	93,50	3	26.935.000,00	7	296.976.174,00	35,00	11,85																				
02.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																							
02.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	60	Bln	38.665.561.015,57	12	9.039.575.747,00	12	Bln	10.629.883.189,00	12	10.211.446.560,00	100,00	96,06	3	2.131.596.675,00	15	12.343.043.235,00	25,00	31,92																				
02.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disediakan	60	Bln	10.151.963.164,55	12	1.777.875.558,00	12	Bln	1.189.951.480,00	12	1.127.248.183,00	100,00	94,73	3	186.092.717,00	15	1.313.340.900,00	25,00	12,94																				
02.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																																							
02.15.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi yang dibuat	60	Bln	854.200.000,00	12	119.173.000,00	-	0	-	0	-			0	-	0	-	0,00	0,00																				
02.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																							
02.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai yang diikuti	214	Kali	1.473.520.000,00	6	334.775.916,00	33	Kali	45.000.000,00	4	14.367.800,00	12,12	31,93	5	11.050.000,00	9	25.417.800,00	4,21	1,72																				
02.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																																							
02.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Jenis	34.357.000,00	3	7.778.000,00	3	Jenis`	1.260.000,00	3	1.260.000,00	100,00	100,00	0	-	3	1.260.000,00	25,00	3,67																				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)							Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD Tahun (2023)			Realisasi Renja PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	Rp.	K	%
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4	
02.15.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	11	Jenis	29.862.390,00	9	13.696.800,00	-	0	-					0	-	0	-	-	0,00
02.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	60	Bln	1.071.719.475,00	12	164.331.138,00	12	Bulan	131.955.260,00	12	131.359.928,00	100,00	99,55	3	1.600.000,00	15	132.959.928,00	25,00	12,41
02.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bln	266.037.250,00	12	85.757.500,00	12	Bulan	27.409.390,00	12	5.299.390,00	100,00	19,33	3	28.893.600,00	15	34.192.990,00	25,00	12,85
02.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	60	Bln	24.000.000,00	12	4.800.000,00	-	0	-	0	-			0	-	0	-	-	0,00
02.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	60	Bln	4.736.503.866,87	12	725.087.395,00	12	Bulan	779.000.000,00	12	779.000.000,00	100,00	100,00	3	184.536.154,00	15	963.536.154,00	25,00	20,34
02.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
02.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	225	Unit	540.080.000,00	5	24.970.000,00	-	0	-	0	-			0	-	0	-		
02.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	24	Unit	332.866.892,00	2	33.000.000,00	1	unit	5.000.000,00	1	4.850.000,00	100,00	97,00	0	-	1	4.850.000,00	4,17	1,46
02.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
02.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	60	Bln	85.500.000,00	12	24.374.000,00	12	Bulan	12.300.000,00	1	4.850.000,00	8,33	39,43	3	3.000.000,00	4	7.850.000,00	6,67	9,18
02.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Bln	1.126.331.058,00	12	109.476.170,00	12	Bulan	121.520.000,00	12	121.520.000,00	100,00	100,00	3	15.851.316,00	15	137.371.316,00	25,00	12,20
02.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
02.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	27	Unit	3.330.745.000,00	25	634.563.912,00	25	Unit	190.535.000,00	25	190.535.000,00	100,00	100,00	25	33.161.414,00	25	223.696.414,00	92,59	6,72
02.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	251	Unit	320.430.000,00	49	27.079.500,00	49	Unit	292.277.000,00	49	292.277.000,00	100,00	100,00	1	700.000,00	50	292.977.000,00	19,92	91,43
02.15.01.1.09.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	Unit	3.428.889.938,40	3	575.012.870,00	3	Unit	545.538.701,00	3	545.538.701,00	100,00	100,00	0	19.357.320,00	3	564.896.021,00	100,00	16,47

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)						Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
			K	Satuan	Rp.	K	Rp.	Target Renja PD Tahun (2023)			Realisasi Renja PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp.	K	Rp.	K	%
								K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	%						
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6		9		10 = 5+7+9			
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi;	25	Persen	36.082.029.145,99															
		2. persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	47																	
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang ditetapkan	1	Dokumen	1.600.000.000,00															
2.15.02.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang disusun	1	Dokumen	800.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang terlaksana	2	kegiatan	400.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah laporan pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ	16	Dokumen	400.000.000,00	2	463.698.000,00	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah perlengkapan jalan provinsi yang diadakan/disediakan	69	titik/lokasi	11.815.491.676,16															
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah titik yang disediakan Perengkapan Jalannya	320	Unit	10.806.741.676,16	7	1.899.534.615,00	64	Titik/Lokasi	2.338.396.570,00	64	2.252.383.886,00	100,00	96,32	0	42.181.868,00	64	2.294.565.754,00	20,00	21,23
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah titik yang direhabilitasi/dipelihara Perengkapan Jalannya	25	Unit	1.008.750.000,00	4	239.455.000,00	-	0	-	0	-	-	-	0	22.981.908,00	0	22.981.908,00	-	2,28
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola	1	unit	3.861.537.469,83															
2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Yang disusun	5	dokumen	3.861.537.469,83	1	537.770.618,00	1	Dokumen	240.000.000,00	0	-	-	0,00	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah ruas jalan provinsi yang telah ditata/direkayasa Lalu Lintasnya	15	ruas jalan	2.350.000.000,00															
2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan rekayasa lalu lintas yang diadakan/terpelihara	100	unit	350.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.05.03	Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah uji coba/sosialisasi ketertiban lalu lintas/MRLL yang terlaksana	1	kegiatan	70.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah titik dilakukan pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	20	laporan	1.110.000.000,00	2	116.901.842,00	1	Laporan	117.000.000,00	1	108.810.000,00	100,00	93,00	1	29.365.000,00	2	138.175.000,00	10,00	12,45
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi yang Terlaksana	5	kegiatan	820.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	750.000,00	0	750.000,00	-	0,09
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi yang mendapatkan rekomendasi	20	dokumen	1.820.000.000,00															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)						Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
								Target Renja PD Tahun (2023)			Realisasi Renja PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	Rp.	K	%
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4	
2.15.02.1.06.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah SDM Penilai Andalalin yang mengikuti peningkatan kapasitas/kompetensi	10	orang	200.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin yang terlaksana	15	kegiatan	1.020.000.000,00	2	40.118.200,00	1	Laporan	28.000.000,00	1	23.249.700,00	100,00	83,03	0	-	1	23.249.700,00	6,67	2,28
2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	14	laporan	600.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	7.105.000,00	0	7.105.000,00	-	1,18
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang terlaksana	48	kegiatan	2.600.000.000,00															
2.15.02.1.07.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang mengikuti peningkatan kapasitas	10	orang	580.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan pelaksanaan audit/inspeksi/pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	20	laporan	580.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan audit/ inspeksi/ pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	20	laporan	720.000.000,00	1	262.427.476,00	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan pelaksanaan audit/inspeksi/pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20	laporan	720.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia	10	unit	5.470.000.000,00															
2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang beroperasi	10	Trayek	4.750.000.000,00	8	380.434.850,00	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	10	laporan	720.000.000,00	0	0	1	Laporan	162.630.000,00	1	154.900.000,00	100,00	95,25	1	22.625.560,00	2	177.525.560,00	20,00	24,66
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	5	Kawasan	455.000.000,00															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)						Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
			K	Satuan	Rp.	K	Rp.	Target Renja PD Tahun (2023)			Realisasi Renja PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp.	K	Rp.	K	%		
								K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	%								
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6		9		10 = 5+7+9				11 = 10/4	
2.15.02.1.09.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	5	kegiatan	455.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00		
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	2	Dokumen	2.450.000.000,00																	
2.15.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang dirumuskan/ditetapkan	2	dokumen	1.950.000.000,00	3	229.840.593,00	1	Dokumen	110.680.000,00	1	109.917.205,00	100,00	99,31	0	60.394.500,00	1	170.311.705,00	50,00	8,73		
2.15.02.1.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang disosialisasikan/diujicobakan	4	Kegiatan	500.000.000,00	1	13.608.372.305,00	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-		
2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	4	Dokumen	1.350.000.000,00																	
2.15.02.1.12.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	dokumen	1.050.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00		
2.15.02.1.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi di Tiap kabupaten/Kota Di kaltara	3	kegiatan	300.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00		
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	6	Dokumen	990.000.000,00																	
2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang difasilitasi	5	dokumen	460.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)						Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
			K	Satuan	Rp.	K	Rp.	Target Renja PD Tahun (2023)			Realisasi Renja PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp.	K	Rp.	K	%
								K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	%						
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek yang terlaksana	5	kegiatan	530.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	6	Dokumen	1.320.000.000,00															
2.15.02.1.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	Dokumen	600.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.02.1.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang terlaksana	5	Kegiatan	720.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1. persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	57,58	Persen	31.412.839.594,93															
		2. persentase fasilitas keselamatan pelayaran yang tersedia;	43																	
2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	350	Dokumen	1.360.000.000,00															
2.15.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan koordinasi/sinkronisasi/pengawasan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	10	Kegiatan	1.360.000.000,00	2	186.464.800,00	2	Kegiatan	140.000.000,00	2	139.092.624,00	100,00	99,35	0	-	2	139.092.624,00	20,00	10,23
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas	Jumlah Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota	60	Dokumen	1.310.000.000,00															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)							Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD Tahun (2023)			Realisasi Renja PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	Rp.	K	%
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4	
	Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan																		
2.15.03.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah data/informasi pada Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang tersedia	13	Dokumen	710.000.000,00	2	285.275.000,00	0	0	-	0	-	-	-	0	52.731.027,00	0	52.731.027,00	-	7,43
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	15	Laporan	600.000.000,00	1	508.788.989,00	3	Laporan	684.636.364,00	3	672.697.882,00	100,00	98,26	0	57.113.500,00	3	729.811.382,00	20,00	121,64
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Regional yang ditetapkan	2	Dokumen	2.275.000.000,00															
2.15.03.1.08.01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Regional yang disusun	2	Dokumen	1.500.000.000,00	0	-	0	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.03.1.08.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Regional	5	Laporan	775.000.000,00	0	-	0	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	9	Pelabuhan	22.217.839.594,93															
2.15.03.1.09.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Regional yang difasilitasi	5	Dokumen	6.600.000.000,00	4	6.553.783.807,00	2	Dokumen	1.542.280.000,00	2	1.452.456.328,00	100,00	94,18	0	60.043.406,00	2	1.512.499.734,00	40,00	22,92
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpuan Regional	Jumlah Pelabuhan pengumpuan regional di provinsi Kalimantan Utara yang dibangun	5	Pelabuhan	12.017.839.594,93	1	3.535.451.450,00	5	Pelabuhan	2.345.238.256,00	1	2.244.843.929,00	20,00	95,72	0	-	1	2.244.843.929,00	20,00	18,68

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)							Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
								Target Renja PD Tahun (2023)			Realisasi Renja PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	Rp.	K	%
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6		9		10 =5+7+9		11 = 10/4	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dioperasikan dan dipelihara	5	Pelabuhan	1.800.000.000,00	1	4.644.222.279,00	0	0	-	0	-	-	-	1	54.527.238,00	1	54.527.238,00	20,00	3,03
2.15.03.1.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	5	Laporan	1.800.000.000,00	1	681.236.552,00	1	Laporan	25.160.000,00	0	22.864.665,00	-	90,88	0	-	0	22.864.665,00	-	1,27
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibangun/diterbitkan rekomendasi izinnya	12	Pelabuhan	4.250.000.000,00															
2.15.03.1.10.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dibangun	12	Pelabuhan	4.250.000.000,00	1	295.561.000,00	0	0	-	0,00	-	-	-	0	-	0	-	-	0,00
UPTD PELABUHAN TENGGAYU I TARAKAN																				
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																			
2	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																			
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																			
02.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
02.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	60	Bln	1.621.142.135,40	0	-	-	0	-	0	-			0	-	0	-	0,00	0,00
02.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disediakan	60	Bln	1.034.355.550,85	0	-	12	Bln	1.933.467.504,00	12	1.862.713.083,00	100,00	96,34	3	298.848.226,00	15	2.161.561.309,00	25,00	208,98
02.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																			
02.15.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi yang dibuat	60	Bln	34.500.000,00	0	-	-	0	-	0	-			0	-	0	-	0,00	0,00
02.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	-													
02.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai yang diikuti	5	Kali	37.500.000,00	0	-	4	Kali	45.000.000,00	1	10.233.400,00	25,00	22,74	0	-	1	10.233.400,00	20,00	27,29
02.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0	-													
02.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Jenis	15.000.000,00	0	-	3	Jenis	2.885.000,00	3	2.881.000,00	100,00	99,86	3	617.000,00	6	3.498.000,00	50,00	23,32
02.15.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	11	Jenis	25.000.000,00	0	-	3	Jenis	715.000,00	3	650.000,00	100,00	90,91	0	-	3	650.000,00	27,27	2,60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)						Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
								Target Renja PD Tahun (2023)			Realisasi Renja PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	Rp.	K	%
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4	
02.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	60	Bln	75.000.000,00	0	-	12	Bulan	64.282.628,00	12	64.039.350,00	100,00	99,62	3	7.535.000,00	15	71.574.350,00	25,00	95,43
02.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bln	97.500.000,00	0	-	12	Bulan	50.615.512,00	12	50.592.750,00	100,00	99,96	3	1.858.000,00	15	52.450.750,00	25,00	53,80
02.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	60	Bln	30.000.000,00	0	-	12	Bulan	2.160.000,00	12	1.610.000,00	100,00	74,54	3	270.000,00	15	1.880.000,00	25,00	6,27
02.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	60	Bln	150.000.000,00	0	-	12	Bulan	120.000.000,00	12	119.898.024,00	100,00	99,92	3	32.185.058,00	15	152.083.082,00	25,00	101,39
02.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-													
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1	Unit	400.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-	-	0,00	0	-	0	-	-	0,00
02.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	11	Unit	25.000.000,00	0	-	-	0	-	0	-			0	-	0	-		
02.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	5	Unit	50.000.000,00	0	-	8	unit	31.000.000,00	8	25.096.570,00	100,00	80,96	0	-	8	25.096.570,00	160,00	50,19
02.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-													
02.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	60	Bln	27.250.000,00	0	-	12	Bulan	3.215.000,00	12	3.180.750,00	100,00	98,93	0	-	12	3.180.750,00	20,00	11,67
02.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Bln	294.300.000,00	0	-	12	Bulan	253.136.550,00	12	227.425.121,00	100,00	89,84	3	64.298.241,00	15	291.723.362,00	25,00	99,12
02.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0	-													
02.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	9	Unit	297.860.000,00	0	-	9	Unit	448.286.000,00	9	430.137.320,00	100,00	95,95	2	97.594.000,00	11	527.731.320,00	122,22	177,17
02.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50	Unit	50.000.000,00	0	-	10	Unit	46.171.000,00	10	43.122.000,00	100,00	93,40	0	-	10	43.122.000,00	20,00	86,24
02.15.01.1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	Unit	50.000.000,00	0	-	1	Unit	35.000.000,00	1	34.402.240,00	100,00	98,29	0	2.767.000,00	1	37.169.240,00	100,00	74,34
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						-													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)						Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
								Target Renja PD Tahun (2023)			Realisasi Renja PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
			K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	Rp.	K	%
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6		9		10 =5+7+9		11 = 10/4	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	1	Pelabuhan	1.511.453.978,77	0	-													
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dioperasikan dan dipelihara	1	Pelabuhan	1.511.453.978,77	0	-	1	Pelabuhan	114.309.044,00	1	107.336.935,00	100,00	93,90	0	-	1	107.336.935,00	100,00	7,10
UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan																				
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																			
2	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																			
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																			
2.15.01.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
2.15.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun																		
2.15.01.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang di Evaluasi																		
02.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
02.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	60	Bln	1.990.355.679,88			12	Bln	-	12	-	-	-						
02.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disediakan	60	Bln	1.170.629.754,45			12	Bln	1.670.750.000,00	12	1.651.292.579,00	100,00	98,84	3	298.785.279,00			0,00	0,00
02.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																			
02.15.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi yang dibuat	60	Laporan	15.000.000,00															
02.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
02.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	59	Stel	40.000.000,00															
02.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai yang diikuti	5	orang	50.000.000,00															
02.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
02.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15	Jenis	25.000.000,00			5	Jenis`	3.444.300,00	5	3.432.600,00	100,00	99,66	12	-			0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 (n-2)						Target program/kegiatan/Sub kegiatan (Renja PD tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
			K	Satuan	Rp.	K	Rp.	Target Renja PD Tahun (2023)			Realisasi Renja PD Tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp.	K	Rp.	K	%
								K	Satuan	Rp.	K	Rp.	K	%						
1	2	3	4			5		6			7		8 = 7/6		9		10 = 5+7+9			
02.15.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	15	Jenis	25.000.000,00			2	Jenis`	9.103.118,00	2	8.968.800,00	100,00	98,52	0	-			-	0,00
02.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	60	Bln	150.000.000,00			12	Bulan	47.865.783,00	12	45.729.541,00	100,00	95,54	3	9.196.737,00			0,00	0,00
02.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bln	125.000.000,00			12	Bulan	17.787.206,00	12	16.874.000,00	100,00	94,87	3	1.080.000,00			-	#VALUE!
02.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	60	Bln	12.500.000,00			-	0	-	0	-	-	-	0	-			-	0,00
02.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	60	Bln	250.000.000,00			12	Bulan	150.000.000,00	12	150.000.000,00	100,00	100,00	3	87.122.800,00			0,00	0,00
02.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
02.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	4	Unit	316.146.910,56															
02.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	25	Unit	212.500.000,00			6	Jenis`	194.532.137,00	6	193.471.437,00	100,00	99,45	4	-				
02.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	19	Unit	133.900.000,00			2	Jenis`	75.610.696,00	2	71.117.700,00	100,00	94,06	9	-			0,00	0,00
02.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
02.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	60	Bln	12.500.000,00			12	Bulan	1.800.000,00	12	1.440.000,00	100,00	80,00	3	1.700.000,00			-	0,00
02.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Bln	548.580.000,00			12	Bulan	133.764.349,00	12	119.368.816,00	100,00	89,24	3	36.967.552,00			-	0,00
02.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
02.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	6	Unit	90.000.000,00															
02.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50	Unit	90.000.000,00			-	Unit	-	-	-	-	-	35	-			-	0,00
02.15.01.1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5	Unit	50.000.000,00			1	Unit	18.716.080,00	1	17.598.527,00	100,00	94,03	1	-			-	0,00

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

Pagu anggaran Dinas Perhubungan pada tahun 2023 sebesar Rp Rp32.353.932.404,00 yang terdiri dari 3 program, 16 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Hingga triwulan 4 terdapat 1 sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi Tahun (2023 TW 4)			Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi Tahun (2023 TW 4)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 Tw 4 (%)	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Anggaran (Rp.)
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	2	Pelabuhan	8.723.264.750,00	1	Pelabuhan	4.528.908.633,00	50	52

Pada program pengelolaan pelayaran terdapat sub kegiatan yang tidak terealisasi dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pembangunan Fender Pelindung Dermaga Antutan Rp200.000.000,00
 2. Pengawasan Pembangunan Fender Pelindung Dermaga Antutan Rp30.000.000,00
 3. Pembangunan Fender Pelindung Dermaga Tannjung Selor - Pujungan Rp200.000.000,00
 4. Pengawasan Pembangunan Fender Pelindung Dermaga Tannjung Selor - Pujungan Rp30.000.000,00
 5. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ponton Dermaga Antutan dengan pagu Rp870.000.000,00
 6. Pengadan dan Pemasangan Ponton Dermaga Tanjung Selor – Pujungan dengan nilai pagu Rp1.599.945.000,00.
 7. Terdapat Sisa Kontrak adendum Pekerjaan Pemeliharaan Tiang Pancang Pelabuhan Liem Hie Djung sebesar Rp1.122.441.000,00
- Hal yang mempengaruhi terhambatnya pekerjaan adalah keterlambatan distribusi material dan orang, terdapat kendala

pada alat bantu pekerjaan, sehingga dilakukan addendum perpanjangan waktu kontrak.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja

Pagu anggaran Dinas Perhubungan pada tahun 2023 sebesar Rp Rp32.353.932.404,00 yang terdiri dari 3 program, 16 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Secara umum sebagian besar kegiatan telah memenuhi target kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja

Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi Tahun (2022 TW 4)			Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi Tahun (2022 TW 4)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 Tw 4 (%)	
	K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	92.649.850,00	5	Dokumen	92.476.750,00	100	99,81%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	318.824.700,00	3	Laporan	318.816.077,00	100	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81	Org/Bln	10.395.891.852,00	81	Org/Bln	10.018.268.708,00	100	96,37%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1.321.928.300,00	12	Dokumen	1.314.107.926,00	100	99,41%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8	Orang	234.250.000,00	8	Orang	233.910.000,00	100	99,85%
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Paket	3.693.000,00	3	Paket	3.660.850,00	100	99,13%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	Paket	36.425.000,00	2	Paket	36.227.000,00	100	99,46%

Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi Tahun (2022 TW 4)			Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi Tahun (2022 TW 4)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 Tw 4 (%)	
	K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Anggaran (Rp)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Paket	135.074.996,00	3	Paket	134.967.650,00	100	99,92%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	Paket	28.482.400,00	2	Paket	28.355.000,00	100	99,55%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.117.500.000,00	12	Laporan	1.117.441.880,00	100	99,99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	unit	65.250.000,00	8	unit	64.340.000,00	100	98,61%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12.250.000,00	12	Laporan	12.250.000,00	100	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	121.520.000,00	12	Laporan	101.543.251,00	100	83,56%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25	unit	277.703.150,00	25	unit	265.443.010,00	100	95,59%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Unit	18.550.000,00	2	Unit	18.448.000,00	100	99,45%
Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor	3	Unit	548.249.156,00	3	Unit	545.175.620,00	100	99,44%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi								
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	164	unit	1.675.710.000,00	164	unit	1.663.261.717,00	100	99,26%

Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi Tahun (2022 TW 4)			Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi Tahun (2022 TW 4)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 Tw 4 (%)	
	K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Anggaran (Rp)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5	unit	258.160.000,00	5	unit	249.170.000,00	100	96,52%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi								
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4	Laporan	98.500.000,00	4	Laporan	98.443.844,00	100	99,94%
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	Laporan	36.515.000,00	1	Laporan	35.718.800,00	100	97,82%
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi								
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	2	Laporan	38.310.000,00	2	Laporan	37.364.500,00	100	97,53%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4	Laporan	54.998.609,00	4	Laporan	53.983.850,00	100	98,15%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	4	Laporan	133.987.180,00	4	Laporan	133.060.280,00	100	99,31%
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								

Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi Tahun (2022 TW 4)			Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi Tahun (2022 TW 4)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 Tw 4 (%)	
	K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Anggaran (Rp)
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	1.583.169.950,00	1	Dokumen	1.578.596.640,00	100	99,71%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	1	Laporan	40.030.220,00	1	Laporan	38.709.600,00	100	96,70%
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1	Dokumen	609.610.000,00	1	Dokumen	607.970.707,00	100	99,73%
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota	3	Laporan	1.543.025.200,00	3	Laporan	1.537.232.737,00	100	99,62%

Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi Tahun (2022 TW 4)			Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Di Evaluasi Tahun (2022 TW 4)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 Tw 4 (%)	
	K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Satuan	Anggaran (Rp.)	K	Anggaran (Rp)
dalam Daerah Provinsi								
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional								
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1	Unit	2.830.409.091 ,00	1	Dokumen	2.529.236.25 6,00	10 0	89,36%

2.1.3 Faktor Penghambat/Pendorong Capaian Kinerja

Dalam mencapai capaian kinerja, terdapat factor penghambat ataupun pendorong yang turut andil dalam tercapai atau tidaknya target-target yang telah direncanakan. Berikut disajikan table yang dapat menjelaskan factor-faktor apa saja yang berperan dalam capaian kinerja hingga per sub kegiatan

Tabel 2.4 Faktor Penghambat/Pendorong Capaian Kinerja

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Faktor Pendorong Capaian Kinerja
Dinas Perhubungan		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Faktor Pendorong Capaian Kinerja
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Faktor Pendorong Capaian Kinerja
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Faktor Pendorong Capaian Kinerja
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi		
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksy yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Faktor Pendorong Capaian Kinerja
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Keterlambatan Distribusi Material dan Orang serta terdapat kendala pada alat bantu pekerjaan (alat pancang)	-
UPTD Pelabuhan Tengkyu 1 Tarakan		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Faktor Pendorong Capaian Kinerja
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Pengadaan Mebel	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Faktor Pendorong Capaian Kinerja
Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Pengadaan Mebel	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Penghambat Capaian Kinerja	Faktor Pendorong Capaian Kinerja
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal
Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor	-	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal

2.1.4 Implikasi Terhadap Target Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berikut implikasi terhadap target capaian renstra pada Dinas Perhubungan :

1. Pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga mengakibatkan terhambatnya pencapaian realisasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pembiayaan operasional pada UPTD Pelabuhan Tengkeyu I dan UPTD. Liem Hie Djung yang minim berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan pada kedua UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Minimnya Sarana dan Prasarana pada UPTD Pelabuhan Tengkeyu I dan UPTD. Liem Hie Djung yang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan pada kedua UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.5 Kebijakan/Tindakan/Solusi Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat

Untuk mencapai target-target pembangunan bidang perhubungan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk mengakomodir program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan. Pada kegiatan yang bersifat teknis yang membutuhkan waktu pengerjaan yang panjang dapat diverifikasi dan validasi pada saat penetapan kegiatan di awal tahun agar progres pengerjaan pengadaan prasarana Angkutan Umum dapat terlaksana dengan maksimal.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara untuk memastikan ketersediaan layanan moda transportasi yang aman, nyaman dan berkualitas ditengah kendala/keterbatasan yang dihadapi. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya bisa dinilai melalui evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Gubernur dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Data capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan dokumen Renstra serta Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Renstra PD				Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Rasio Konektivitas Transportasi	0.55	0.65	0.80	0.82	0.69	0.70	0.70	0.71	Adanya Penambahan dan Pengurangan pada Trayek Speed Boat dan Kapal Ferry
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Transportasi Publik	80.30	81.00	81.50	82.10	78.06	77.54	78	78.5	Target Tidak Dicapai Karena Masih Kurangnya Sarana Dan Prasarana Pendukung Peningkatan Kenyamanan Pengguna Jasa Perhubungan
3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak ada terjadinya Kecelakaan Dalam 1000 Kali Keberangkatan angkutan
4	On Time Performance Layanan Angkutan	82%	84%	86%	88%	89%	89%	90%	90%	Diukur Ketepatan Waktu Keberangkatan/Tiba Angkutan Pada Simpul Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan transportasi yang menjadi sasaran strategis dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara (Eselon 2), maka ditetapkan target kinerja bagi Kepala Bidang (Eselon 3) yaitu meningkatkan kinerja layanan angkutan serta target kinerja bagi Kepala Seksi (Eselon 4) dan JFT yaitu meningkatkan keselamatan angkutan serta meningkatkan sarana dan prasarana angkutan.

Guna meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana angkutan di Kalimantan Utara maka pada tahun anggaran 2024 ditetapkan kegiatan prioritas berupa kegiatan penunjang dan program teknis pada UPTD Pelabuhan Tenggayu I Tarakan dan Pelabuhan Leim Hie Djung Nunukan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan terutama yang bersifat pelayanan kepada pengguna jasa Transportasi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Konektivitas Transportasi

Konektivitas Transportasi sangat banyak berdampak pada kegiatan dan mobilitas masyarakat sehari-hari. Sulitnya masyarakat memperoleh pelayanan dasar, dikarenakan kondisi geografis yang luas dan terpisah antar pulau-pulau yang belum didukung dengan konektivitas transportasi guna menghubungkan pusat kegiatan masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Konektivitas transportasi juga mendukung potensi wilayah seperti pariwisata akan semakin terangkat dengan kemudahan perpindahan individu dari satu wilayah ke wilayah lain. Kebutuhan logistik masyarakat juga akan semakin terpenuhi, sehingga berefek pada penekanan perbedaan harga produk pada masing-masing wilayah. Pada akhirnya, efek dari konektivitas yang terjaga ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi. Konektivitas transportasi akan memungkinkan wilayah-wilayah di suatu daerah dapat dijangkau sehingga arus/mobilitas orang dan logistik semakin baik.

Dalam konteks Kalimantan Utara, kondisi geografisnya menyebabkan konektivitas antar daerah begitu terbatas. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Kalimantan Utara yang tinggal di pedalaman ataupun perbatasan negara mengingat wilayah Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi tersebut mengakibatkan akses dari maupun menuju daerah-daerah tersebut menggunakan moda transportasi darat sangat sulit dikarenakan infrastruktur jalan yang belum terkoneksi secara menyeluruh dan merata sehingga hanya bisa dijangkau dengan moda transportasi udara. Bahkan

terdapat beberapa daerah di wilayah pedalaman dan perbatasan yang selama ini hanya bisa diakses menggunakan pesawat. Maka tidak mengherankan jika di Kalimantan Utara terdapat banyak bandar udara dan lapangan terbang yang menjadi harapan bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan. Khusus untuk lapangan terbang sebagian besar terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Akan tetapi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi udara. Selain faktor geografis seperti yang digambarkan sebelumnya, jalur transportasi melalui perairan (Laut dan Sungai) serta faktor penyebaran penduduk di Kalimantan Utara yang justru terkonsentrasi di beberapa pulau kecil dan daerah aliran sungai menjadikan ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) sebagai moda transportasi andalan di Kalimantan Utara.

2. Kurang terjangkau harga layanan transportasi sehingga sangat membutuhkan/bergantung pada subsidi pemerintah

Kondisi geografis Kalimantan Utara memanglah menuntut adanya moda transportasi udara dan ASDP meskipun hal tersebut tentu terbilang mahal jika dibandingkan dengan angkutan darat. Untuk itu Dinas Perhubungan mulai melakukan langkah-langkah dalam pengembangan moda transportasi darat. Meski hal tersebut tidak akan sepenuhnya mampu menggantikan moda transportasi lainnya yang selama ini menjadi moda transportasi pilihan utama masyarakat namun pengembangan moda transportasi darat tentu sangat dibutuhkan dalam memperlancar distribusi logistik dan mobilisasi masyarakat.

3. Kurangnya prasarana transportasi (lapter/terminal/pelabuhan) dalam mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat

Belum terpenuhinya kebutuhan terminal penumpang angkutan jalan tipe B di setiap kabupaten/kota serta pemenuhan fasilitas utama dan pendukung. Hal ini berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan darat. Penyediaan terminal penumpang angkutan jalan tipe B dimaksudkan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan (Permenhub No. PM 132 Tahun 2015). Terminal menjadi simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum, tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian lalu lintas, prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang. Serta merupakan

Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan kota.

4. Tingginya fatalitas dan angka kecelakaan transportasi

Belum terpenuhinya fasilitas perlengkapan keselamatan LLAJ di jalan provinsi untuk mengurangi potensi kecelakaan. Untuk mendukung keselamatan, keamanan, kelancaran berlalu lintas diperlukan perlengkapan jalan yang cukup. Tujuan dari pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi efisien.

5. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM perhubungan

Perlunya Peningkatan SDM secara Kualitas maupun Kuantitas untuk maksimalanya kinerja pada layanan perhubungan

6. Belum optimalnya kegiatan pengendalian dan pengawasan keselamatan angkutan serta penerapan regulasi kebijakan Kementerian Perhubungan

Guna pemenuhan keselamatan, keamanan dan kelancaran berlalu lintas dibutuhkan peningkatan pengawasan kegiatan angkutan barang dan orang sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu mencegah kerusakan infrastruktur jalan, meningkatkan kelancaran lalu lintas jalan, serta meningkatkan efektifitas waktu tempuh perjalanan kendaraan serta menghemat BBM dan pencegahan polusi udara.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan.

Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pada Bab ini juga akan disandingkan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan analisis rencana kebutuhan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Data tersebut disajikan kedalam tabel dan catatan singkat sebagai berikut:

Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
DINAS PERHUBUNGAN				29.082.258.809,00					62.258.840.563,00				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100	Persen	17.244.442.676,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100	Persen	16.658.873.783,00	
1	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun dan di Evaluasi	6	Dokumen	680.207.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun dan di Evaluasi	5	Dokumen	522.959.540,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bulungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	224.352.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bulungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	219.308.000,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	455.855.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	303.651.540,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	13.256.429.907,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	13.256.429.907,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92	Orang/Bulan	11.853.652.535,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92	Orang/Bulan	11.853.652.535,00	Adanya Penambahan Pegawai dari 2 UPTD Pelabuhan dan Dinas Induk
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1.402.777.372,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1.402.777.372,00	Adanya Penambahan Pegawai dari 2 UPTD Pelabuhan dan Dinas Induk

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12	Laporan	120.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12	Laporan	120.000.000,00	
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bulungan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	120.000.000,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bulungan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	120.000.000,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	320.704.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	300.000.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bulungan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	320.704.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bulungan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	300.000.000,00	Adanya Pembiayaan Taruna/I PTDI-STTD dan diklat PPNS
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	1.200.308.823,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	1.320.128.200,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	21.985.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	21.785.000,00	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	5.972.478,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bulungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	-	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	214.343.895,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	261.316.400,00	Penambahan Belanja Makan Minum dan Belanja Dekorasi
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	53.207.450,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	37.026.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	4.800.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	0	-	
6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	900.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.000.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	7	Unit	311.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	5	laporan	658.406.000,00	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulungan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	50.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulungan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	
2	Pengadaan Mebel	Bulungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Paket	11.000.000,00	Pengadaan Mebel	Bulungan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Paket	305.000.000,00	Pengadaan Kursi dan Meja Pejabat
3	Pengadaan Gedung Kantor/Banguna n Lainnya	Bulungan	Jumlah Unit Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang disediakan	1	Unit	200.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Bulungan	Jumlah Unit Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Yang disediakan	1	Unit	200.000.000,00	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Paket	50.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Paket	153.406.000,00	Adanya Penambahan Pengadaan Peralatan dikarenakan penghapusan aset
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12	Bulan	274.906.446,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	136.167.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah				Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	16.800.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	13.800.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	258.106.446,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	122.367.500,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	49	Unit	1.080.886.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	40	Unit	344.782.636,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	Unit	500.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	Unit	212.060.000,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	80.886.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	16.497.000,00	
3	Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor	Bulungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	500.000.000,00	Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor	Bulungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	116.225.636,00	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN		1. persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi;	25,00	Persen	6.521.775.902,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN		1. persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi;	25,00	Persen	29.370.236.550,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		2. persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	43,50	Persen		ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		2. persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	43,50	Persen		
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang ditetapkan	0	Dokumen	100.000.000,00	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang ditetapkan	0	Dokumen	49.972.000,00	
1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Bulungan, KTT, Tarakan, Nunukan, Malinau	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	Dokumen	100.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Bulungan, KTT, Tarakan, Nunukan, Malinau	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1	Dokumen	49.972.000	
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah perlengkapan jalan provinsi yang diadakan/disediakan	69	titik/lokasi	2.866.775.902,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah perlengkapan jalan provinsi yang diadakan/disediakan	69	Unit	4.677.000.000,00	
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Bulungan, KTT, Tarakan, Nunukan, Malinau	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	64	Unit	2.616.775.902,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Bulungan, KTT, Tarakan, Nunukan, Malinau	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	64	Unit	4.427.000.000,00	Adanya analisis baru mengenai kebutuhan perlengkapan jalan
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5 Kab/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	5	Unit	250.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5 Kab/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	5	Unit	250.000.000,00	penambahan data analisis rehabilitasi perlengkapan jalan
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola	1	unit	300.000.000,00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola	1	Dokumen	22.711.920.000,00	
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Bulungan	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1	dokumen	300.000.000,00	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Bulungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Yang disusun	1	dokumen	22.711.920.000,00	Pembebasan Lahan Terminal Tipe B

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah ruas jalan provinsi yang telah ditata/direkayasa Lalu Lintasnya	3	ruas jalan	500.000.000,00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah ruas jalan provinsi yang telah ditata/direkayasa Lalu Lintasnya	3	ruas jalan	560.807.024,00	
1	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bulungan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	20	unit	100.000.000,00	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bulungan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	0	unit	-	
2	Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	Dokumen	50.000.000,00	Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	0	kegiatan	-	
3	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4	laporan	250.000.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4	laporan	259.000.000,00	
4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	Laporan	100.000.000,00	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	Laporan	301.807.024,00	Penambahan Kegiatan Rapat Tindak Lanjut Rencana Aksi Keselamatan, Pelajar Pelopor, Abdi Yasa Teladan
5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)		Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan	4	dokumen	410.000.000,00	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)		Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi yang	4	dokumen	171.144.578,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	untuk Jalan Provinsi		Provinsi yang mendapatkan rekomendasi				untuk Jalan Provinsi		mendapatkan rekomendasi				
1	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Bulungan	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2	orang	40.000.000	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Bulungan	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	0	orang	-	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3	Laporan	220.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3	Laporan	171.144.578	
3	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3	laporan	150.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0	laporan	-	
6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang terlaksana	5	kegiatan	540.000.000,00	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang terlaksana	5	kegiatan	149.996.062,00	
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Bulungan	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	orang	120.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Bulungan	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang mengikuti peningkatan kapasitas	0	orang	-	
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	5 Kab/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan audit/inspeksi/pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4	laporan	120.000.000,00	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	5 Kab/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan audit/inspeksi/pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4	laporan	149.996.062,00	
3	Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggara n Kompetensi Pengemudi Kendaraan	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	4	laporan	150.000.000,00	Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	0	laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Bermotor Provinsi		Kendaraan Bermotor Provinsi				Kendaraan Bermotor Provinsi						
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4	laporan	150.000.000,00	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	laporan	-	
7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia	2	unit	770.000.000,00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia	2	unit	483.999.924,00	
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	Unit	500.000.000,00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	Unit	224.299.962,00	
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4	laporan	270.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4	laporan	259.699.962,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
8	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	1	Kawasa n	95.000.000,00	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	1	Kawasa n	160.397.000,00	
1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	95.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0	kegiatan	160.397.000	Terdapat penambahan untuk kegiatan sosialisasi keselamatan Lalin untuk masyarakat dan kalangan pelajar
9	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1	Dokume n	450.000.000,00	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1	Dokume n	334.300.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	dokumen	350.000.000,00	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	dokumen	334.300.000,00	
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	100.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0	Dokumen	-	
10	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	0	Dokumen	-	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	0	Dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0	dokumen	-	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0	dokumen	-	
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi di Tiap kabupaten/Kota Di kaltara	0	kegiatan	-	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi di Tiap kabupaten/Kota Di kaltara	0	kegiatan	-	
11	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	1	Dokumen	220.000.000,00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	1	Dokumen	-	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	5 Kab/Kota	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi	1	Unit	100.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam	5 Kab/Kota	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	0	dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		persyaratan perizinan				Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kot a	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1	Laporan	120.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0	kegiatan	-	
12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	1	Dokume n	270.000.000,00	Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	1	Dokume n	70.699.962,00	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan	5 Kab/Kot a	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	1	Unit	120.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	5 Kab/Kota	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	1	Unit	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						Terintegrasi Secara Elektronik						
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1	Laporan	150.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1	Laporan	70.699.962,00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		1. persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	57,58	Persen	5.316.040.231,00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		1. persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	57,58	Persen	16.229.730.230,00	
			2. persentase fasilitas keselamatan pelayaran yang tersedia;	28,00	Persen				2. persentase fasilitas keselamatan pelayaran yang tersedia;	28,00	Persen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	70	Dokumen	58.200.636,00	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	70	Dokumen	-	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	2	Laporan	58.200.636	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi/sinkronisasi/pengawasan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	0	Laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
2	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	70	Dokumen	50.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	70	Dokumen	117.000.000,00	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam	5 Kab/Kota	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem	5 Kab/Kota	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20	Dokumen	117.000.000	Penambahan Operasional Penertiban Ijin Kapal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
2	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	12	Dokumen	240.000.000,00	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	12	Dokumen	298.200.635,00	
1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1	Dokumen	100.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Tarakan, KTT	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	2	Dokumen	198.200.635	Pengadaan Rambu Sungai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	3	laporan	140.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	3	laporan	100.000.000	
3	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang ditetapkan	1	Dokumen	200.000.000	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang ditetapkan	1	Dokumen	500.000.000	
1	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	5 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	0	Dokumen		Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	5 Kab/Kota	Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang disusun	1	Dokumen	500.000.000	Penyusunan DLKR/DLKP Prov. Kaltara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
2	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1	laporan	200.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	0	laporan	-	
4	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	2	Pelabuhan	4.667.839.595,00	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	2	Pelabuhan	15.381.529.595,00	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	5 Kab/Kota	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1	Unit	500.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Bulungan	Jumlah Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional yang difasilitasi	3	Unit	3.030.690.000	AMDAL Sei Fatimah
2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	5 Kab/Kota	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1	Unit	3.467.839.595	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Tarakan, Nunukan	Jumlah Pelabuhan pengumpan regional di provinsi Kalimantan Utara yang dibangun	2	Unit	11.650.839.595	Peningkatan Sarana & Prasarana Pelabuhan Tengkyu I Tarakan
3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	5 Kab/Kota	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2	Unit	500.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Tarakan, Nunukan, KTT	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dioperasikan dan dipelihara	2	Unit	500.000.000	penambahan Pemeliharaan pelabuhan Bebatu
4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan	5 Kab/Kota	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian	4	laporan	200.000.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan	Tarakan, Nunukan	Jumlah laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	4	laporan	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pengumpuan Regional		Pelabuhan Pengumpuan Regional				Pengumpuan Regional						
5	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibangun/diterbitkan rekomendasi izinnya	2	Pelabuhan	100.000.000,00	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kalimantan Utara	jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibangun/diterbitkan rekomendasi izinnya	2	Pelabuhan	50.000.000,00	
1	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Kab/Kota	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	4	Unit	100.000.000	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Bulungan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dibangun	0	Unit	50.000.000	
UPTD PELABUHAN TENGGAYU 1 TARAKAN				1.089.402.251,92						7.865.910.000,00			Anggaran pada Ranwal tidak mencukupi untuk kebutuhan Operasional Pelabuhan untuk pelayanan Pengguna jasa pelabuhan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup	100	Persen	784.590.735,66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100	Persen	4.015.910.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			Dinas Perhubungan										
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	528.140.735,66	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	2.450.850.000,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tarakan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12	Bulan	324.777.442,40	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tarakan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	0	Bulan	-	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disediakan	12	Bulan	203.363.293,26	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disediakan	12	Bulan	2.450.850.000,00	
2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12	Laporan	4.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12	Laporan	10.000.000,00	
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tarakan	Jumlah laporan pengelolaan retribusi yang dibuat	12	Laporan	4.000.000,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tarakan	Jumlah laporan pengelolaan retribusi yang dibuat	12	Laporan	10.000.000,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	20.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	50.000.000,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarakan	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Orang	20.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tarakan	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6	Orang	50.000.000,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	78.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	342.160.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tarakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	Jenis	3.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tarakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	Jenis	20.000.000,00	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2	Jenis	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2	Jenis	25.000.000,00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12	Bulan	15.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12	Bulan	75.000.000,00	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	19.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	70.000.000,00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	Bulan	6.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	Bulan	2.160.000,00	
6	Penyelenggaraan n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12	Bulan	30.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12	Bulan	150.000.000,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	7	Unit	10.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	7	Unit	130.000.000,00	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0	Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0	Unit	-	
2	Pengadaan Mebel	Tarakan	Jumlah mebel yang diadakan	5	Unit	5.000.000,00	Pengadaan Mebel	Tarakan	Jumlah mebel yang diadakan	5	Unit	50.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	2	Unit	5.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	2	Unit	80.000.000,00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	63.950.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	270.550.000,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah layanan penyediaan surat menyurat	12	Bulan	5.450.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah layanan penyediaan surat menyurat	12	Bulan	5.000.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Bulan	58.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Bulan	265.550.000,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	20	Unit	80.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	20	Unit	762.350.000,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	9	Unit	60.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	9	Unit	657.350.000,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	Unit	55.000.000,00	
3	Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor	Tarakan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor	Tarakan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	Unit	50.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan	81	Skor/Nilai	304.811.516,26	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan	81	Skor/Nilai	3.850.000.000,00	
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Regional	1	Pelabuhan	304.811.516,26	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	1	Pelabuhan	3.850.000.000,00	
1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Tarakan	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang dioperasikan dan dipelihara	1	Pelabuhan	304.811.516	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Tarakan	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang dioperasikan dan dipelihara	1	Pelabuhan	3.850.000.000	
UPTD PELABUHAN LIEM HIE DJUNG NUNUKAN				1.089.402.251,92						3.327.257.869,00			Anggaran pada Ranwal tidak mencukupi untuk kebutuhan Operasional Pelabuhan untuk pelayanan Pengguna jasa pelabuhan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100	Persen	1.058.438.996,71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	100	Persen	3.327.257.869,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	631.238.996,71	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	2.180.375.856,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nunuka n	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12	Bulan	375.141.380,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nunukan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12	Bulan	-	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nunuka n	Jumlah honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disediakan	12	Bulan	256.097.616,71	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nunukan	Jumlah honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disediakan	12	Bulan	2.180.375.856,00	
2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12	Laporan	3.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12	Laporan	-	
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nunuka n	Jumlah laporan pengelolaan retribusi yang dibuat	12	Laporan	3.000.000,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nunukan	Jumlah laporan pengelolaan retribusi yang dibuat	12	Laporan	-	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	10.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	-	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Nunuka n	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	0	Orang	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Nunukan	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	0	Orang	-	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nunuka n	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	Orang	10.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nunukan	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	Orang	-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	117.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	492.660.901,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nunuka n	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	Jenis	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nunukan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	Jenis	8.041.060,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nunukan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3	Jenis	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nunukan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3	Jenis	-	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nunukan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12	Bulan	30.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nunukan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12	Bulan	75.229.941,00	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nunukan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	25.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nunukan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	69.389.900,00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nunukan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12	Bulan	2.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nunukan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12	Bulan		
6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nunukan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12	Bulan	50.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nunukan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12	Bulan	340.000.000,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	19	Unit	90.400.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	19	Unit	380.000.000,00	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nunukan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1	Unit	30.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nunukan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1	Unit	80.000.000,00	
2	Pengadaan Mebel	Nunukan	Jumlah mebel yang diadakan	10	Unit	50.000.000,00	Pengadaan Mebel	Nunukan	Jumlah mebel yang diadakan	10	Unit	-	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nunukan	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	8	Unit	10.400.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nunukan	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	8	Unit	300.000.000,00	pengadaan Portal Gate

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	136.300.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	228.666.292,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nunukan	Jumlah layanan penyediaan surat menyurat	12	Bulan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nunukan	Jumlah layanan penyediaan surat menyurat	12	Bulan	2.380.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nunukan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Bulan	133.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nunukan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Bulan	226.286.292,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	12	Unit	70.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	12	Unit	45.554.820,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nunukan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1	Unit	40.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nunukan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1	Unit	-	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nunukan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	Unit	20.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nunukan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	Unit	14.000.000,00	
3	Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor	Nunukan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor	Nunukan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	Unit	31.554.820,00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan	81	Skor/Nilai	30.963.255,21	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan	81	Skor/Nilai	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	1	Pelabuhan	30.963.255,21	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	1	Pelabuhan	-	
1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Nunukan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dioperasikan dan dipelihara	1	Pelabuhan	30.963.255	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Nunukan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dioperasikan dan dipelihara	1	Pelabuhan		

Berdasarkan tabel diatas kebutuhan anggaran Dinas Perhubungan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD Tahun 2025 masih terdapat banyak kekurangan guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan operasional Pelabuhan. Pada Dinas Perhubungan terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 33.176.581.754,00. Hal ini dikarenakan adanya penambahan usulan pada Program Penyelenggaraan LLAJ yaitu pekerjaan pembebasan lahan terminal , adanya analisis terkait kebutuhan perlengkapan jalan, sehingga ada penambahan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi. Usulan kegiatan tersebut yaitu pemasangan Guard rail di Kab. KTT yang berfungsi untuk pelindung agar kendaraan yang melewatinya terlindungi dari terjatuh ke sungai/jurang, pada lokasi yang akan dipasang guard rail ini merupakan daerah rawan kecelakaan (DRK) yang ditetapkan dari hasil survey DRK. Adapun pemasangan PJU dan WL berfungsi untuk penerangan dan alat pemberi isyarat adanya bahaya di suatu ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai Daerah potensi Kecelakaan (DPK) terutama pada saat malam hari khususnya pada titik tikungan jalan licin, dan persimpangan.

Penambahan anggaran juga diusulkan pada Program Pengelolaan Pelayaran yaitu Pemeliharaan Pelabuhan Bebatu dimana setelah dilakukan monitoring terdapat kerusakan yang cukup parah pada tiang penyangga dermaga pelabuhan yang dikhawatirkan akan bertambah parah jika tidak segera dilakukan perbaikan. Kegiatan lain yaitu Peningkatan Pelabuhan Tengkeyu dan Liem Hie Djung berupa penambahan sarana dan prasarana Pelabuhan guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan penumpang yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu terdapat juga usulan anggaran untuk kegiatan Penyusunan AMDAL Sei Fatimah, Penyusunan FS, Masterplan dan DED Pelabuhan Tanah Kuning. Kegiatan ini dianggap prioritas karena saat ini telah tersedianya trayek *speed boat* Tarakan – Tanah Kuning yang melayani penumpang yang akan menggunakan trayek tersebut, namun Pelabuhan atau Dermaga yang digunakan masih dianggap kurang layak yaitu Dermaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), untuk itu diperlukan Pelabuhan yang layak dan aman digunakan sebagai Pelabuhan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang pada trayek Tarakan – Tanah Kuning tersebut.

UPTD Pelabuhan Tengkeyu I terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp...dan UPTD Liem Hie Djung terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp....

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan memperoleh usulan program/kegiatan yang bersumber dari pokok – pokok pikiran Dewan Provinsi Kalimantan Utara. Usulan tersebut berupa pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang merupakan salah satu penyediaan perlengkapan jalan, dimana penyediaan ini dilakukan di jalan sesuai dengan kewenangan Provinsi. Adapun usulan tersebut tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.7 Usulan Program/Kegiatan/Subkegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No	Uraian Usulan	Asal Usulan (Pokir/Usulan Kab/Kota)	Hasil Verifikasi	Sub Kegiatan	Alasan Penolakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan Penerangan Jalan Umum di Kota Tarakan	Usulan ini berasal dari usulan Pokir DPRD Provinsi Kaltara	Diakomodir	Penyediaan Perlengkapan Jalan	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berikut telaah terhadap kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi berdasarkan analisis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Nasional	Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	5 Kab/kota
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5 Kab/Kota
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	5 Kab/kota
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Bulungan
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Bulungan
	Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Jumlah Dokumen Uji Coba dan	

Prioritas Nasional	Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
	Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	5 Kab/kota
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	5 Kab/kota
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi		
	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Bulungan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Kab/kota
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	5 Kab/kota
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Bulungan
	Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	5 Kab/kota
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5 Kab/kota

Prioritas Nasional	Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	5 Kab/kota
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya		

Prioritas Nasional	Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
	Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	5 Kab/kota
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	5 Kab/kota
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Kab/kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	5 Kab/kota
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan	Jumlah Angkutan Taksi Tidak Dalam Trayek Sesuai wilayah Kerja dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang	5 Kab/kota

Prioritas Nasional	Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	memenuhi persyaratan perizinan	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	5 Kab/kota
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	5 Kab/kota
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai Danau Dan Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai Danau dan penyebrangan Lintas Pelabuhan Antaraa Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	5 Kab/kota
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau Dan Penyebrangan Dan Jumlah Laporan Pengendalian Dan Pengawasan Izin Persetujuan	5 Kab/kota

Prioritas Nasional	Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
		Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kab/Kota Dalam Daerah Provinsi	
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	5 Kab/kota
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan	Bulungan dan Tarakan,

Prioritas Nasional	Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
	Pelabuhan Pengumpan Regional	Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Tarakan dan Nunukan
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	KTT, Tarakan, Nunukan
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	5 Kab/kota
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Bulungan

3.2 Telaahan terhadap prioritas provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Data tersebut disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.2 Telaahan terhadap prioritas provinsi

Prioritas Nasional	Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai, udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	5 Kab/kota
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5 Kab/Kota
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	5 Kab/kota
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Bulungan
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Bulungan
	Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas	Jumlah Laporan Pengawasan dan	5 Kab/kota

Prioritas Nasional	Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
	Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	5 Kab/kota
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi		
	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Bulungan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Kab/kota
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	5 Kab/kota
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Bulungan
	Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	5 Kab/kota
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5 Kab/kota
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	

Prioritas Nasional	Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	5 Kab/kota
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi	5 Kab/kota

Prioritas Nasional	Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
	Perkotaan Kewenangan Provinsi	dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	5 Kab/kota
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Kab/kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	5 Kab/kota
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi Tidak Dalam Trayek Sesuai wilayah Kerja dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	5 Kab/kota

Prioritas Nasional	Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	5 Kab/kota
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	5 Kab/kota
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai Danau Dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antaraa Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	5 Kab/kota
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau Dan Penyeberangan Dan Jumlah Laporan Pengendalian Dan Pengawasan Izin Persetujuan	5 Kab/kota

Prioritas Nasional	Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4
		Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyebrangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kab/Kota Dalam Daerah Provinsi	
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		

3.3 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pembangunan di bidang perhubungan Kalimantan Utara akan berpengaruh besar terhadap perekonomian Regional Kalimantan Utara, mengingat kegiatan dibidang transportasi mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian barang dan jasa serta mobilisasi orang ke seluruh pelosok wilayah Kalimantan Utara, sehingga mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi perekonomian Kalimantan Utara. Arah kebijakan Provinsi Kalimantan Utara dalam pengembangan perhubungan adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat serta membuka keterisolasian/aksesibilitas wilayah tertinggal, daerah pedalaman dan daerah perbatasan.

Kondisi fisik wilayah yang cukup luas dan sebagian besar berada di kemiringan lereng di atas 40 derajat mengakibatkan penyediaan sarana prasarana fisik utama menjadi lebih sulit dan mahal. Masih banyaknya wilayah yang belum terhubung oleh jaringan jalan dan jembatan serta simpul-simpul transportasi (terminal, dermaga, pelabuhan dan lapangan terbang) yang masih minim kian menyulitkan aksesibilitas ke beberapa daerah khususnya ke wilayah pedaman/perbatasan.

Berdasarkan isu-isu diatas maka dirumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.3 Target Dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, & Indikator Kinerja Kunci		Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Awal (2021)	Target Kinerja Tahun Ke-				
								2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi	Rasio konektivitas transportasi	IKU	Rasio	0.55	0.55	0.55	0.65	0.80	0.82	0.85
2			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Publik	IKSS	Nilai/ Skor	77.75	79.00	80.30	81.00	81.50	82.10	82.50
3			On Time Performance Layanan Transportasi	IKK	Nilai/ Skor	80	80	82	84	86	88	90
4			Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Publik		Rasio	0	0	0	0	0	0	0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara maka ditetapkan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun anggaran 2025. Berikut disajikan tabel rumusan rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 beserta prakiraan maju tahun anggaran 2026, sebagai berikut :

Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Urusan / Bidang Urusan & Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2025									
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikasi
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan		
							Target	Satuan	Target	Satuan	TARGET	Satuan	TARGET	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
DINAS PERHUBUNGAN															29,082,809.00
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan					100	Persen							17,400,285.00
02.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun dan di Evaluasi						5	Dokumen					537,940.00
02.15.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Bulungan					2	Dokumen	2	Dokumen	234,296.00
02.15.01.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Bulungan					4	Laporan	4	Laporan	303,651.00

[illegible]

Kode	Urusan / Bidang Urusan & Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2025									
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikasi
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan		
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
02.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulungan					12	Bulan	12	Paket	149,490.00
02.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulungan					12	Bulan	12	Paket	37,046,000
02.15.01.1.06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulungan					12	Bulan	12	Laporan	830,000.00
02.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan						4	Unit					333,840.00
02.15.01.1.07.01	Pengadaan Mebel			Jumlah mebel yang diadakan	Jumlah Paket Mebel yang	Bulungan					2	Unit	2	Paket	150,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan & Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2025									
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan		
							Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
02.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulungan					12	Bulan	12	Laporan	126,598.00
02.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharannya						78	Unit					268,715.00
02.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bulungan					26	Unit	26	Unit	230,210.00
02.15.01.1.	Pemeliharaan Peralatan dan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Bulun					40	Unit	11	Unit	10.027.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan & Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2025									
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indikasi
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	12
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah perlengkapan jalan provinsi yang diadakan/disediakan						69	titik/lokasi					4,150,000.00
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			Jumlah titik yang disediakan Perlengkapan Jalannya	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	5 Kab/Kota					64	titik/lokasi	64	Unit	3,900,000.00
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			Jumlah titik yang direhabilitasi/dipelihara Perlengkapan Jalannya	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	5 Kab/Kota					5	titik/lokasi	5	Unit	250,000.00
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang dikelola						0	unit					299,980.00
2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Tipe B	Bulungan					0	0	1	Dokumen	299,985.00

[illegible]

Kode	Urusan / Bidang Urusan & Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2025									
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Ind
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan		
							Target	Satuan	Target	Satuan	Targ et	Satuan	Targ et	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
	Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Daerah Provinsi yang tersedia												
2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Trayek Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang beroperasi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Kab/Kota					0	Trayek	2	Unit	196,04500
2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota			Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	5 Kab/Kota					4	laporan	4	Laporan	258,75000

[illegible]

Kode	Urusan / Bidang Urusan & Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2025									
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Ind
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan		
							Target	Satuan	Target	Satuan	Targ et	Satuan	Targ et	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
2.15.02.1.1 0.02	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	5 Kab/K ota					1	Kegiat an	1	Dokum en	349,995 00
2.15.02.1. 14	Penerbitan Izin Penyelenggara an Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko			Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang					1	Dokum en					88,449 00

[illegible]

Kode	Urusan / Bidang Urusan & Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2025									
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Ind
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan		
							Target	Satuan	Target	Satuan	Targ et	Satuan	Targ et	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
2.15.03.1.0 5.03	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Jumlah data/informasi pada Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang tersedia	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5 Kab/Kota					1	Dokumen	1	Dokumen	198,20000

Kode	Urusan / Bidang Urusan & Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2025									
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indik
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan		
							Target	Satuan	Target	Satuan	Targ et	Satuan	Targ et	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
2.15.03.1.05.04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5 Kab/Kota					3	Laporan	3	Laporan	99,972,300

Kode	Urusan / Bidang Urusan & Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2025										
		Capai an Progr am	Hasil Kegiat an	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)	Keluaran Sub Kegiatan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indik	
							Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Renstra PD)		Keluaran Sub Kegiatan			
							Target	Satuan	Target	Satuan	Targ et	Satuan	Targ et	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	
2.15.03.1.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan			Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan	5 Kab/Kota								12	Dokumen	117,10000

[illegible]

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Secara umum Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara sudah cukup baik dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp27.402.842.386,00 dengan realisasi fisik sebesar 90%. Adapun beberapa kegiatan yang masih terkendala diselesaikan melalui adendum penambahan waktu pelaksanaan kontrak.
2. Rumusan program/kegiatan/Sub Kegiatan meliputi 3 Program ,26 Kegiatan, dan 54 Sub Kegiatan
3. Pagu indikatif Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 29.082.258.809,00 serta masing-masing Rp1.106.982.341,69 untuk UPTD Pelabuhan Tengkeyu 1 Tarakan dan Rp Rp1.106.982.341,69 untuk UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara masih kekurangan Rp33.176.581.754,00 Sedangkan untuk kedua UPTD, masing-masing masih kekurangan anggaran untuk operasional pelayanan pelabuhan sebesar Rp6.776.507.748,08 untuk UPTD Pelabuhan Tengkeyu 1 Tarakan dan Rp2.237.855.617,08 untuk UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

5.2 SARAN

Analisis Pagu pada tahun 2025 dialokasikan untuk operasional dan pelayanan masyarakat pengguna jasa perhubungan serta peningkatan sarana dan prasarana perkantoran. Pada Bidang Teknis dialokasikan kegiatan-kegiatan dengan tujuan pengembangan transportasi dan peningkatan keselamatan berlalu lintas. Adapun 2 UPTD mayoritas anggaran dialokasikan untuk penambahan SDM dan peningkatan operasional pelayanan. Sehingga dbutuhkan dukungan anggaran guna pencapaian program dan kegiatan yang telah disusun.